



**PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2018**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Rusma Putri Nurjati

3201415040

**JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi jurusan geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Mei 2020

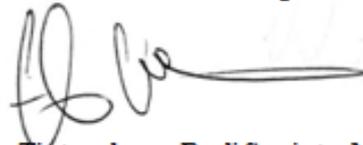
Yang Menyetujui

Dosen Pembimbing



Sriyanto, S.Pd. M.Pd
NIP.197707222005011001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Geografi



Dr. Tyaturahono Budi Sanjoto, M.si
NIP. 196210191988031002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sos
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Drs. Moch. Arifien, M.Si
NIP.195508261983031003

Wahyu Setyaningsih, ST, MT
NIP.197912222006042001

Sriyanto, S.Pd., M.Pd
NIP.197707222005011001

Mengetahui
Dekan

UNNES
Dr. Moch. Solihatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Rusma Putri Nurjati
3201415040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu; dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak (Q.S. Al-Baqarah: 216).

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ruslan dan Ibu Rokhimah, yang telah memberi dukungan terhadap saya selama ini dan selalu memberikan yang terbaik untuk saya.
2. Kedua kakak saya yaitu Nurul Pratiwi dan Pinesthi Laksa Ambawani yang selalu memberi semangat.
3. Teman-teman seperjuangan saya, teman satu prodi Pendidikan Geografi 2015
4. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

SARI

Nurjati, Rusma Putri. 2020. *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2018.* Skripsi, Jurusan Geografi, FIS Unnes, Pembimbing Sriyanto, S.Pd., M.Pd.142 halaman.

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan menjadi lebih cerdas selanjutnya akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang diikuti oleh warga Indonesia atas tanggung jawab pemerintah daerah. 1.140 anak usia sekolah di Kecamatan Suradadi tidak melanjutkan pendidikan. Masalah dalam penelitian ini: (1) bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun? (2) faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun atau biasa disebut dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang telah dilaksanakn oleh beberapa sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah orangtua yang memiliki anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Teknik pengumpulan data menggunakan angket wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan tabulasi silang atau crosstab.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selamat 3 periode (tahun 2016-2018) mengalami kenaikan. Tingkat APK mengalami kenaikan sebesar 1,58% dan tingkat APM sebesar 1,33%. Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, antara lain: tingkat pendapatan orangtua tergolong rendah yaitu kurang dari Rp. 1.500.000, tingkat pendidikan terakhir orangtua rata-rata di tingkat SD, jenis pekerjaan orangtua rata-rata sebagai nelayan, keluarga mendukung anak untuk sekolah waktu yang dibutuhkan anak untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah 10-15 menit dengan jarak tempuh 3km-5km dan jumlah rata-rata keluarga inti adalah 5 orang.

Saran dari penelitian ini yaitu: Dinas Pendidikan harus memastikan informasi program wajib belajar 12 tahun, agar masyarakat mengetahui informasi terbaru, negara bertanggungjawab atas anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Wajib Belajar 12 tahun, Sekolah Menengah Atas.

ABSTRACT

Nurjati, Rusma Putri. 2020. "Implementation of the 12-Years Compulsory Education Program in Suradadi Tegal 2018". Scription. Department of Geography, FIS UNNES, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Sriyanto, S.Pd., M.Pd.142 pages.

Education is an important element in development, because with education the community will become smarter and subsequently will form high quality Human Resources (HR). Compulsory education is a minimum education program that is followed by Indonesian citizens for local government responsibility. 1,140 school-aged children in Suradadi did not continue their education. Problems in this study: (1) how is the implementation of the 12 year compulsory education program? (2) factors that hinder the implementation of the 12-year compulsory education program in Suradadi District.

The purpose of this study is to describe the implementation of the 12-year compulsory education program or commonly called Pendidikan Menengah Universal (PMU) which has been carried out by several schools in Suradadi, Tegal. This research is descriptive research. The subjects of this study were parents who had junior high school graduates who did not proceed to the next level. Data collection techniques using interview and documentation questionnaires. Data analysis techniques used are descriptive analysis and cross tabulation.

The results of this study indicate that the implementation of the 12 year compulsory education program in Suradadi, Tegal survived 3 periods (in 2016-2018) experiencing an increase. The APK rate increased by 1.58% and the APM rate was 1.33%. Obstacles to the implementation of the 12-year compulsory education program in Suradadi, Tegal, among others: the level of parents' income is relatively low, namely less than Rp. 1,500,000, the average level of education of parents at primary school level is 57.8%, the majority of parents work as fishermen, families support children for school by 89.4%, the time needed for children to travel from home to school 10 -15 minutes by 50.8% with a distance of 3km-5km by 47.3% and the average number of nuclear families is 5 people or 59.6%.

Suggestions from this research are: The Office of Education must ensure information on 12-year compulsory education programs, so that the public knows the latest information, the state is responsible for children who are less able to get free education.

Keywords: Implementation, 12-year compulsory education program, high school.

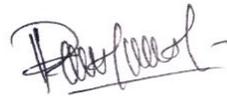
PRAKATA

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2018. Penulisan skripsi dapat terselesaikan oleh bantuan tenaga, pikiran, dan waktu dari Sriyanto, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing penulis dan juga dari berbagai pihak antara lain:

1. Prof. Dr. Fakhur Rokhman M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijinnya untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan perijinan penelitian sehingga penulis lancar dalam menyelesaikan skripsi
3. Dr.Tjaturahono Budi Sanjoto M.si., Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberikan ijin diselenggarakannya sidang skripsi penulis
4. Drs. Moch. Arifien, M.Si., penguji I dalam sidang skripsi penulis yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk menguji dan memberikan masukan
5. Wahyu Setyaningsih, ST, MTi., selaku penguji II dalam sidang skripsi penulis yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk menguji dan memberikan masukan
6. Para Dosen Jurusan Geografi atas ilmu yang telah diberikan selama menempuh studi di Jurusan Geografi.

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Rusma Putri Nurjati
3201415040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Batasan Istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	9
2.1. Deskripsi Teoritis	9
2.1.1. Pengertian Pendidikan	9
2.1.1.1. Pendidikan Formal.....	10
2.1.1.2. Pendidikan Non Formal	11

2.1.1.3. Pendidikan Informal.....	11
2.1.2. Pelaksanaan Wajib Belajar.....	12
2.1.2.1 Kecukupan Tenaga Pendidik	14
2.1.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana.....	15
2.1.2.3 Ketersediaan Pembiayaan Pendidikan	15
2.1.3. APK dan APM	16
2.1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK).....	18
2.1.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM).....	19
2.1.3.3 Rata-Rata Lama Sekolah.....	19
2.1.4. Tujuan dan Target Wajib Belajar.....	20
2.1.5. Tantangan dalam Wajib Belajar.....	21
2.1.6. Hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar	25
2.2. Penelitian Relevan.....	32
2.3. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Populasi Penelitian.....	39
3.2. Sample dan Teknik Sampling.....	39
3.3. Variabel Penelitian.....	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	46

4.1.2 Kondisi Penduduk Daerah Penelitian.....	49
4.2 Hasil Penelitian	54
4.2.1 Tingkat APK dan APM di Kabupaten Tegal	55
4.2.2 Perbandingan Antara Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang Sekolah dan Tidak Sekolah di Kecamatan Suradadi Kabupaten tegal Tahun 2018	57
4.2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	58
4.2.4 Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di SMA/MA/SMK di Kecaatan Suradadi Kabupaten Tegal.....	70
4.3 Hambatan- Hambatan Program Wajib Belajar	76
4.3.1 Tingkat Pendidikan Orangtua	76
4.3.2 Tingkat Pendapatan Orangtua.....	79
4.3.3 Tanggungan Orangtua	83
4.3.4 Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal.....	85
4.3.5 Faktor Jarak dari Rumah ke Sekolah.....	90
4.3.6 Fasilitas Jalan yang Dilalui	92
4.3.7 Transportasi yang Digunakan	94
BAB V PENUTUP	103
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Angka APK dan APM	17
Tabel 2.1. IPM	17
Tabel 2.2 Penelitian Relevan.....	32
Tabel 3.1 Jumlah Orangtua	39
Tabel 3.2 Perhitungan Persebaran Sample.....	41
Tabel 4.1 Banyaknya Perdukahan RT dan RW.....	48
Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan	48
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	51
Tabel 4.5 Banyaknya Rumah Tangga/ Rata-rata Orang Rumah Tangga.....	51
Tabel 4.6 Kepadatan Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan	52
Tabel 4.7 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian	53
Tabel 4.8 Data Apk dan APM Siswa.....	56
Tabel 4.9 Perbandingan Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang Sekolah dan Tidak Sekolah.....	58
Tabel 4.10 Data Peserta Didik.....	72
Tabel 4.11 Data Guru dan tenaga Kependidikan.....	72
Tabel 4.12 Jumlah Rombongan Belajar	72
Tabel 4.13 Data Bangunan/ Ruangan Lain	72
Tabel 4.14 Data Guru dan Tenaga Kependidikan	73
Tabel 4.15 Jumlah Rombongan Belajar	74
Tabel 4.16 Data Bangunan	74
Tabel 4.17 Data Guru dan Tenaga Kependidikan	75

Tabel 4.18 Jumlah Rombongan Belajar.....	75
Tabel 4.19 Data Bangunan/ Ruang Lain.....	76
Tabel 4.20 Tingkat Pendidikan Orantu.....	77
Tabel 4.21 Tabel Pendidikan Non Fromal.....	78
Tabel 4.22 Tingkat Pendidikan Formal.....	78
Tabel 4.23 Lamanya Sekolah Non-Formal.....	79
Tabel 4.24 Tingkat Pendapatan Orangtua.....	79
Tabel 4.25 Pendapatan Sampingan.....	81
Tabel 4.26 Total Pengeluaran Keluarga.....	82
Tabel 4.27 Kecukupan Kebutuhan Sehari-Hari.....	82
Tabel 4.28 Jumlah Tnaggungan Orangtua.....	83
Tabel 4.29 Jumlah Anak.....	84
Tabel 4.30 Jumlah Anggota Keluarga Inti.....	85
Tabel 4.31 Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal.....	85
Tabel 4.32 Waktu yang Dibutuhkan untuk Membimbing Belajar.....	86
Tabel 4.33 Alasan Anak Tidak Melanjutkan Sekolah.....	87
Tabel 4.34 Sosialisasi Wajib Belajar.....	88
Tabel 4.35 Tujuan Menyekolahkan Anka.....	89
Tabel 4.36 Waktu yang Dibutuhkan dari Rumah ke Sekolah.....	90
Tabel 4.37 Jarak dari Rumah ke Sekolah.....	91
Tabel 4.38 Jenis Jalan yang di Lalui.....	92
Tabel 4.39 Kondisi Jalan.....	93
Tabel 4.40 Situasi Jalan.....	93
Tabel 4.41 Kendaraan yang Digunakan.....	94

Tabel 4.42 Angkutan Umum.....	95
Tabel 4.43 Transportasi Umum yang Ada disekitar	96
Tabel 4.44 Biaya yang dikeluarkan Menggunakan Angkutan Umum.....	96
Tabel 4.45 Tingkat Kemaceta.....	96
Tabel 4.46 Kemudahan dalam Mengakses Angkutan Umum.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir	38
Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian.....	47
Gambar 4.2 Grafik Tingkat APK dan APM.....	58
Gambar 4.3 Desa Karangwuluh.....	61
Gambar 4.4 Desa Gembongdadi.....	62
Gambar 4.5 Desa Karangwuluh.....	63
Gambar 4.6 Desa Harjasari	64
Gambar 4.7 Desa Kertasari	65
Gambar 4.8 Desa Jatimulya.....	66
Gambar 4.9 Desa Sidoharjo.....	67
Gambar 4.10 Desa Sidoharjo.....	68
Gambar 4.11 Desa Purwahamba	69
Gambar 4.12 Desa Suradadi.....	70
Gambar 4.12 Desa Bojongsana	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Metode Pengumpulan Data	108
Lampiran 2. Lembar Dokumentasi	110
Lampiran 3. Kisi-Kisi Instrumen Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten tegal	111
Lampiran 4. Angket Penelitian.....	113

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang (Talman, dkk:2016). Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan secara jelas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan yang berimbang akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. (Dikdasmen, 2009:59).

Dalam bidang pendidikan, pemerintah membuat kebijaksanaan, yaitu membuat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Dewi, Sriyanto, 2019)

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya kebijakan program Wajib Belajar. Program Wajib Belajar ini tercantum dalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Pengertian belajar menurut Fry, Keteridge, dan Marshall (2008, p.8) *“Learning is not single thing; it may involve mastering abstract principles, understanding proofs, remembering factual information, acquiring methods, techniques and approaches, recognition, reasoning, debating ideas, or developing behaviour appropriate to specific situations; it is about change.”* yang berarti bahwa belajar bukan satu hal, namun mungkin melibatkan penguasaan prinsip-prinsip abstrak, memahami bukti, mengingat informasi aktual, memperoleh metode, teknik dan pendekatan, pengakuan, penalaran, berdebat ide, atau mengembangkan perilaku yang sesuai dengan situasi tertentu. Oleh karena itu, belajar adalah tentang perubahan sebelum dan sesudah belajar.

Wajib belajar merupakan program yang mewajibkan semua anak usia sekolah mengikuti proses belajar sesuai tingkat umurnya, sejak dikeluarkannya Inpres No 10 Tahun 1973, pemerintah secara terencana meningkatkan

pembangunan sarana pendidikan dasar. Pada tahun 1983, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Wajib Belajar Enam Tahun untuk anak usia 7-12 tahun secara nasional, kemudian Pemerintah Indonesia melanjutkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sejak bulan Mei tahun 1994. Dan kembali Pemerintah Indonesia sebagai kelanjutan dari program Wajib Belajar 9 Tahun, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla mencanangkan Program Indonesia Pintar. Program ini memiliki fokus utama pada implementasi Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, dengan menyelenggarakan pendidikan gratis bagi anak-anak usia 7-18 tahun sampai jenjang menengah atau dari SD MI sampai SMA/SMK/MA. (Talman, dkk:2016)

Menurut Sparta (Rothbard, 1999, p.19) mengatakan *“The full logical conclusion of the compulsory system; absolute State control over the “whole child”, uniformity and education in passive obedience to State orders”*. Keseluruhan kesimpulan logis dari sistem wajib belajar adalah kendali penuh negara terhadap “seluruh anak”, keseragaman dan pendidikan diatur pada perintah negara. Oleh karena itu, keseluruhan dari sistem wajib belajar diatur khusus oleh undang-undang setiap negara yang melaksanakan wajib belajar. Sekolah-sekolah yang melaksanakan program wajib belajar harus memenuhi standar instruksi yang ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan.

Menurut Seel (2012, p.697) mengatakan bahwa *“Compulsory education refers to the most crucial period of formal education required by law of all children between certain ages in a given country”*. Seel menyatakan bahwa pendidikan wajib merupakan periode paling penting dari pendidikan formal yang diwajibkan

oleh hukum dari setiap negara, pendidikan wajib diberikan kepada semua anak usia tertentu berdasarkan undang-undang negara tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Sensus Penduduk (SP) 2000 jumlah penduduk Indonesia adalah 206,3 juta jiwa, dan pada tahun 2010 menjadi 237 juta jiwa. Sedangkan hingga 2018 ini disebutkan berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa, jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Dengan jumlah penduduk yang besar ini tentu tidak sebanding dengan kualitas SDM-nya. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, kualitas SDM Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini dapat diketahui dari rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), yang mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita. Berdasarkan data BPS 2017, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, angka IPM Jawa Tengah menduduki peringkat ke 13 dengan nilai 70,52. Nilai tersebut dapat digolongkan kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah semakin baik, akan tetapi masih ada beberapa kabupaten yang memiliki Angka Partisipasi Kasar rendah yang masih jauh dari target pemerintah daerah, salah satunya adalah Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa, dengan luas wilayah 876,1 km². Kabupaten Tegal terdiri dari 11 kecamatan. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tegal merupakan salah satu alasan yang menggerakkan pelaksanaan Program Wajib Belajar. Dari SD, SMP dan SMA.

Diantara jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. APK dan APM terendah terdapat pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut adalah data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) per-Kecamatan di Kabupaten Tegal 2018.

Tabel 1.1 APK dan APM kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2018

No	Nama Kecamatan	APK	APM
1.	Adiwerna	114%	122%
2.	Slawi	99,6%	64%
3.	Margasari	72%	38%
4.	Kramat	64%	16%
5.	Pangkah	49%	40%
6.	Talang	37%	22%
7.	Bumijawa	41%	30%
8.	Balapulang	36%	26%
9.	Tarub	62%	55%
10.	Lebaksiu	61%	39%
11.	Dukuhwaru	33%	20%
12.	Dukuhturi	54%	31%
13.	Suradadi	29%	15%
14.	Warureja	59%	34%
15.	Bojong	37%	32%
16.	Jatinegara	39%	23%
17.	Pagerbarang	33%	16%
18.	Kedungbanteng	37%	29%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi jumlah APK di setiap kecamatan di Kabupaten Tegal, APK tertinggi terdapat di Kecamatan Adiwerna, dan APK terendah terdapat di Kecamatan Suradadi, yaitu 29% yang menurut Dinas P dan K jumlah tersebut masih jauh dari target pemerintah Kabupaten Tegal yaitu sebesar 76%.

Dari hal tersebut penulis bermaksud mencari tahu dengan meneliti pada Kecamatan Suradadi, faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan program

Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, dengan mengambil judul penelitian “Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan tersebut, maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.
2. Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan tersebut, maka manfaat dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Dinas Pendidikan, dapat memberikan informasi aktual mengenai kondisi fisik dan kondisi sosial ekonomi terhadap program wajib belajar 12 tahun agar dapat memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
- b. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai program wajib belajar 12 tahun dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan serta membuktikan teori dengan di lapangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan masukan tentang visi pendidikan sehingga dapat menyukseskan dan mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
- b. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat dalam mengikuti program wajib belajar 12 tahun.
- c. Bagi orangtua, penelitian ini dapat memberikan masukan agar mereka mengubah pandangannya tentang nilai anak dan visi pendidikan demi mensukseskan program wajib belajar 12 tahun.

1.5. Batasan Istilah

1.5.1. Pelaksanaan Wajib belajar 12 tahun

Wajib belajar merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah (Departemen Pendidikan Nasional;216). Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan penduduk di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal yang berusia 16-18 tahun yang telah lulus SMP namun tidak melanjutkan ke SMA atau yang tidak melaksanakan program wajib belajar 12 tahun sampai tuntas.

1.5.2. Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun

Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang dimaksud di Kecamatan Suradadi adalah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun pada anak usia 16-18 tahun untuk memperoleh pendidikan dan menamatkan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Teoritis

2.1.1. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa, Sumber Daya Manusia bermutu yang merupakan produk pendidikan adalah merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Pasal 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Departemen Pendidikan Nasional, 2012:12)

Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pendidikan merupakan suatu proses yang panjang dan berlangsung terus menerus. Sebuah pendidikan akan selalu diarahkan pada sebuah tujuan yang dapat membawa sebuah fungsi yang memiliki manfaat.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh.

2.1.1.1 Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Departemen Pendidikan Nasional, 2010:98). Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pasal 14, jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Disamping jenjang pendidikan itu dapat diadakan pendidikan prasekolah, yang dapat merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

Pendidikan Dasar menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terbentuk dari sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lainnya yang sederajat.

Tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pasal 17, menyatakan pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah atas dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas

(SMA). Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan MAdrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Tercantum dalam Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 19 menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

2.1.1.2 Pendidikan NonFormal

Tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 menyatakan bahwa pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan siap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan lain yang di tunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan NonFormal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis (Departemen Pendidikan Nasional, 2010:31).

2.1.1.3 Pendidikan InFormal

Kegiatan Pendidikan Informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri (Departemen Pendidikan Nasional,

2010:30). Pendidikan informal dengan kata lain adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan, dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa.

2.1.2. Pelaksanaan Wajib Belajar

Salah satu langkah untuk melakukan proses pendidikan adalah melalui pembelajaran. Melalui pembelajaran, kita dapat melaksanakan proses pendidikan secara sistematis dan terpantau sehingga dapat mengetahui secara pasti tingkat perubahan peserta didik. Proses pendidikan secara alamiah dirasa terlalu lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Sering terjadi permasalahan yang belum selesai, namun sudah muncul masalah berikutnya yang mendesak diselesaikan juga. Sudah pasti hal tersebut membuat kita merasa kesulitan. Maka dari itu, proses pendidikan harus dikelola secara baik dan benar agar sesuai dengan kebutuhan hidup. Sejak saat itu, proses pendidikan dilakukan secara sadar sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. dengan cara seperti itu maka kita dapat bertahan dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Padahal proses pendidikan yang dilakukan memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang singkat.

Pelaksanaan wajib belajar menurut Vassiliou (2011, p. 9) *“In most countries, the start of compulsory education coincides with the start of primary education. Almost everywhere, children who have reached compulsory school age must be enrolled in an education institution”*. Artinya, sebagian negara menetapkan pendidikan wajib dimulai dengan pendidikan dasar. Hampir di setiap negara, anak-

anak yang telah mencapai usia wajib belajar harus terdaftar di institusi pendidikan formal, nonformal, atau informal dengan kata lain bagi anak-anak usia wajib belajar harus bersekolah.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pencaanangan program wajib belajar, dengan tujuan untuk mempercepat proses pendidikan yang diselenggarakan. Program wajib belajar adalah program yang mewajibkan semua anak usia sekolah mengikuti proses belajarsesuai dengan tingkat usia. pada awalnya wajib belajar 6 tahun, artinya anak usia sekolah dasar harus bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa anak Indonesia minimal berpendidikan setingkat Sekolah Dasar. Berikutnya, program tersebut dikembangkan menjadi wajib belajar 9 tahun. Artinya, anak usia Sekolah Menengah Pertama harus bersekolah sehingga anak Indonesia minimal berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama. Setelah program tersebut dianggap berhasil, selanjutnya program ditingkatkan menjadi program wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun artinya anak-anak usia Sekolah Menengah Atas harus bersekolah.

Wajib belajar merupakan kesempatan yang terbuka bagi semua orang. Anak-anak usia sekolah harus menjadi bagian dari program tersebut. Kita tidak membiarkan anak-anak usia sekolah berkeliaran pada saat jam-jam belajar, karena mereka seharusnya mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan program wajib belajar, sudah tidak ada alasan bagi setiap anak bangsa untuk tidak bersekolah. Maka, diharapkan terjadi peningkatan sumber daya manusia secara signifikan.

Program wajib belajar yang diadakan pemerintah ini merupakan kesempatan baik untuk peningkatan kualitas diri. Khususnya untuk masyarakat

miskin , program ini merupakan program yang memang dicanangkan untuk mereka. Akan menjadi kerugian jika program tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal, dan program wajib belajar ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab pemerintah, dan sudah seharusnya kita memnfaatkan program ini karena berbagai pengetahuan dan ketrampilan dapat diperoleh, pengetahuan dan ketrampilan inilah yang menjadi bekal dalam melakukan perubahan pada hidup kita.

Menurut Yenny 2017, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun meliputi kecukupan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan pembiayaan pendidikan;

2.1.2.1 Kecukupan tenaga pendidik

Menurut Standar Nasional Pendidikan, pendidikan harus memiliki kualifikasi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/SMK, satuan pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C dan tenaga pendidik pada lembaga kursus pelatihan.

Menjadi pendidik yang profesional haruslah memiliki kompetensi keahlian dasar sebagai tenaga pendidik. Sebagaimana dinyatakan dalam standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bahwa tenaga pendidik menurut PP No. 19/2005, Bab VI Pasal 28 tentang standarisasi tenaga pendidik adalah :

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- (2) Kualifikasi akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogic
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi profesional, dan
 - d. Kompetensi social
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah / sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

2.1.2.2 Ketersediaan sarana dan prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan

habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, dan tempay lainnya guna menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

2.1.2.3 Ketersediaan pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumberdaya tersedian digunakan untuk mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat beragam tergantung dari kondisi masing-masing

wilayah seperti kondisi geografis , tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

2.1.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Pembangunan manusia merupakan proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Badan Pusat Statistik (2018) menjelaskan konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur pencapaian keseluruhan negara atau provinsi. IPM mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial ekonomi di negara atau provinsi tertentu. IPM direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup yang layak (*standard of living*). indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat adalah angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli. (*purchasing power parity/PPP*)

Tabel 2.1. Indeks Pembangunan Manusia per Provinsi di Indonesia
(Periode 2013 sampai 2017)

No	Wilayah	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Aceh	68.3	68.8	69.4	70	70.6
2	Sumatera Utara	68.3	68.8	69.5	70	70.5
3	Sumatera Barat	68.9	69.3	69.9	70.7	71.2
4	Riau	69.9	70.3	70.8	71.2	71.7
5	Jambi	67.7	68.2	68.8	69.6	69.9
6	Sumatera Selatan	66.1	66.7	67.4	68.2	68.8
7	Bengkulu	67.5	68	68.5	69.3	69.9
8	Lampung	65.7	66.4	66.9	67.65	68.2
9	Kep. Bangka Belitung	67.9	68.2	69	69.5	69.9
10	Kep. Riau	73	73.4	73.5	73.9	74.4
11	D.K.I Jakarta	78	78.3	78.9	79.6	80
12	Jawa Barat	68.2	68.8	69.5	70	70.6
13	Jawa Tengah	68	68.7	69.4	69.9	70.5
14	D I Yogyakarta	76.4	76.8	77.5	78.3	78.8
15	Jawa Timur	67.5	68.1	68.9	69.7	70.2
16	Banten	69.4	69.8	70.2	70.9	71.4
17	Bali	72	72.4	73.2	73.6	74.3
18	Nusa Tenggara Barat	63.7	64.3	65.1	65.8	66.5
19	Nusa Tenggara Timur	61.6	62.2	62.6	63.1	63.7
20	Kalimantan Barat	64.3	64.8	65.5	65.8	66.2
21	Kalimantan Tengah	67.4	67.7	68.5	69.1	69.7
22	Kalimantan Selatan	67.1	67.6	68.3	69	69.6
23	Kalimantan Timur	73.2	73.8	74.1	74.5	75.1
24	Kalimantan Utara	67.9	68.6	68.7	69.2	69.8
25	Sulawesi Utara	69.4	69.9	70.3	71	71.6
26	Sulawesi Tengah	65.7	66.4	66.7	67.4	68.1
27	Sulawesi Selatan	67.9	68.4	69.1	69.7	70.3
28	Sulawesi Tenggara	67.5	68	68.7	69.3	69.8
29	Gorontalo	64.7	65.1	65.8	66.2	67
30	Sulawesi Barat	61.5	62.2	62.9	63.6	64.3
31	Maluku	66	66.7	67	67.6	68.1
32	Maluku Utara	64.7	65.1	65.9	66.6	67.2
33	Papua Barat	60.9	61.2	61.7	62.2	62.9
34	Papua	56.2	56.7	57.2	58	59
	Indonesia	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81

Sumber : ipm.bps.go.id

Pada tabel diatas dapat diketahui jumlah IPM pada tiap provinsi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun. IMP tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IMP 80 pada tahun 2017, dan IMP terendah terdapat di Provinsi Papua yaitu 59. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi IMP suatu daerah. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, nilai IMP selalu bertambah pada setiap tahunnya. Ini menunjukkan kinerja pemerintah yang dapat diketahui secara kuantitatif berdasarkan data yang ada.

Indikator proses pendidikan menunjukkan keadaan proses pendidikan yang diterapkan terjadi di masyarakat. Data yang diperlukan dalam mengetahui indikator proses pendidikan, antara lain: APK, APM, dan rata-rata lama sekolah.

2.1.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Menurut Kemdikbud, APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APK mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, tetapi indikator ini lebih banyak bercerita tentang keberhasilan sistem pendidikan dalam mendidik anak dan remaja, bukan pada penduduk dewasa. APK memberikan gambaran secara umum mengenai banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Rumus dalam menghitung APK:

APK = Jumlah penduduk yang sekolah di SMA:Jumlah penduduk umur 16-18 tahun X100 %

2.1.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Menurut Kemdikbud APM adalah perbandingan antara siswa sekolah usia tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dari APK karena pembilangnya lebih kecil. APM membatasi usia murid sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil karena menunda saat mulai sekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, dan lulus lebih awal. Rumus dalam menghitung APM:

$$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 yang sekolah di SMA}}{\text{Jumlah penduduk umur 16-18 tahun}} \times 100\%$$

2.1.3.3 Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

2.1.4. Tujuan dan Target Wajib Belajar

Sudah pasti sasaran utama program Wajib Belajar 12 tahun yaitu masyarakat miskin. Untuk merealisasikan Wajib Belajar ini dilaksanakan, dimana beban biaya ditanggungkan seluruhnya kepada Pemerintah. Selain bertujuan meningkatkan

SDM, wajib belajar ini juga dimaksudkan untuk pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi masyarakat miskin.

Menurut Talman 2016, sejumlah target yang ingin dicapai pada 2019 melalui Wajib Belajar 12 Tahun adalah jumlah satuan pendidikan SMA di Indonesia sebanyak 14.311 sekolah dengan rasio 386 siswa per-sekolah. Sedangkan saat ini rasionya 361 siswa/sekolah dengan jumlah 12.329 SMA. Untuk guru, data 2014 menunjukkan jumlah guru SMA sebanyak 346.751 orang dengan rasio 14,5 siswa per guru. Target 2019 adalah sebanyak 358.459 guru dengan rasio 15,4 siswa/guru.

Untuk perpustakaan sekolah, jumlah perpustakaan saat ini sebanyak 9.750 unit dengan tingkat kepemilikan 79%. ditargetkan pada 2019 dari 14.311 sekolah yang ada, semuanya sudah memiliki perpustakaan atau menjadi 100%. sementara laboratorium kimia, saat ini hanya terdapat 5.451 unit atau 44% dari semua SMA yang tersebar di Indonesia, sehingga pada 2019 ditargetkan mencapai 100% kepemilikannya.

Sedangkan untuk laboratorium fisika, saat ini terdapat 5.970 atau 48% sehingga ditargetkan ditargetkan pada 2019 terdapat 12.879 SMA yang memilikinya atau naik menjadi 90%. Untuk laboratorium biologi saat ini dimiliki 7.621 SMA atau 50% dan ditargetkan menjadi 80%. Laboratorium komputer dimiliki 7.706 SMA atau 63% dan ditargetkan menjadi 100%. Dengan target-target ini, guna menyukseskan Wajib Belajar 12 Tahun.

2.1.5. Tantangan dalam Wajib Belajar

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan

Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Keluarga Produktif melalui program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Di sisi lain dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 secara jelas menerangkan berbagai kegiatan pembangunan pendidikan yang telah dan akan dilakukan. Terungkap berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya mengenai Program Wajib Belajar 12 Tahun. Dimana dinyatakan bahwa pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun belumlah mencapai keadaan yang diinginkan.

Melihat semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja terampil serta peningkatan input pendidikan, Pemerintah sangat berkeinginan mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Namun jelas hal itu sulit tercapai apabila berbagai persoalan belum ditangani secara baik. Menurut Talman 2016, terdapat 5 persoalan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun:

1. Persoalan Regulasi dan Koordinasi Antar lembaga/Kementrian

Secara umum jika meneliti berbagai regulasi yang ada kesamaan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya belum terlaksana. Tampak bahwa program Wajib Belajar 12 Tahun masih dalam proses persiapan, sebab aturan-aturan yang masih berlaku adalah berkaitan dengan Wajib belajar 9 Tahun, baik di tingkat UU maupun di tingkat Pemerintah (PP) atau peraturan Menteri (Permen). Ketidakpaduan ini menyebabkan ada regulasi yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang sebaliknya, yaitu menghambat Wajib Belajar 12 tahun.

2. Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Pemerintah Daerah

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antar wilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang dan ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai, dengan adanya ketimpangan pembangunan membuat pemerataan pendidikan di Indonesia juga terganggu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pokok permasalahan yang harus segera diselesaikan guna tercapainya keselarasan pendidikan terutama infrastruktur sekolah yang menjadi syarat utama dalam mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun.

Dengan kondisi yang seperti ini, maka wajib belajar 12 tahun masih terhambat. Sementara yang masih berjalan saat ini adalah melanjutkan inisiatif kemendikbud periode sebelumnya yang mencanangkan PMU atau Pendidikan Menengah Universal, sebagai lanjutan dari wajib belajar 12 tahun. Jika wajib belajar diamanatkan oleh Undang-Undang, wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah, dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan ada sanksi bagi yang tidak mengikuti. PMU hanya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu, difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung penduduk usia sekolah, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, tidak ada sanksi bagi yang tidak mengikuti.

Jadi, jika ada yang melaksanakan Wajib belajar 12 tahun di beberapa kota/kabupaten sebagai inisiatif Pemerintah Daerah yang ditandai dengan

ditetapkannya Perda berkaitan dengan hal tersebut, namun jika ada Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan, maka tidak akan dikenai sanksi.

3. Program Wajib Belajar 9 Tahun yang Belum Tuntas

Di sisi lain program Wajib Belajar 12 Tahun juga masih terkendala dengan adanya fakta bahwa Program Wajib Belajar 9 tahun nyatanya belum tuntas hingga saat ini. Menurut Talman, disebutkan bahwa Wajib Belajar 9 tahun ini baru mencakup 66.15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 541 kabupaten dan kota).

Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program Wajib Belajar 12 tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun kedepan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019. berarti masih ada fokus pembangunan pendidikan terhadap peningkatan akses pendidikan dasar sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk menyelesaikan program Wajib Belajar 9 tahun, sebelum pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun secara penuh.

4. Sistem Kualitas Layanan Pendidikan

Pemerintah secara berkelanjutan berusaha mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi sarana pendidikan, pengembangan kurikulum, dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Berdasarkan referensi dari kemendikbud jumlah sekolah untuk SD/MI ada 174.205 sekolah, untuk SMP/MTS ada 56.686 sekolah, sedangkan untuk SMA/MA/SMK ada 35.660 sekolah. Laju penduduk di Indonesia sangat tinggi, hal

ini berarti setiap tahun anak yang masuk pendidikan dasar bertambah, dan yang meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya juga bertambah, oleh karena itu dalam rangka menuju program wajib belajar 12 tahun pemerintah harus melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur pendidikan untuk sekolah menengah, supaya ketika program Wajib Belajar 12 Tahun diwajibkan dari segi infrastruktur sudah siap.

5. Kebijakan Keuangan untuk Wajib Belajar 12 Tahun

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang APBN 2017, definisi Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Dinyatakan juga presentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.

Berdasarkan pasal 21 UU APBN 2017, perencanaan anggaran dalam bidang pendidikan dialokasikan sebesar: (1) anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 416.090.233.749.000,00 (empat ratus enam belas triliun sembilan puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); (2) presentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp 2.080.451.168.747.000,00 (dua kuadriliun delapan puluh triliun empat ratus lima

puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Jika rata-rata untuk biaya operasional sekolah setiap siswa sebesar Rp.1000.000 selama setahun, maka alokasi anggaran pendidikan setiap tahun untuk BOS sebagai konsekuensi khusus program wajib belajar 12 tahun akan mencapai lebih dari Rp25,5 Trilyun. Padahal anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak lebih dari 40 Trilyun. Oleh karena itu wajib belajar 12 tahun mengalami kendala utama pada anggaran, karena kebutuhan yang sangat besar dan untuk program yang lain.

2.1.6. Hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar

Keberhasilan Program Wajib Belajar, menurut Nopembri (2007) dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam individu, faktor internal meliputi; kemampuan anak, minat sekolah, ekspektasi(harapan) anak, persepsi siswa tentang sekolah dan aspirasi/cita-cita anak. Faktor eksternal meliputi; kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, keutuhan keluarga, persepsi orangtua, dan ketersediaan sarana prasarana.

Penelitian Nopembri (2007) , mengidentifikasi bahwa faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah dapat disebabkan oleh:

1. Tingkat Pendidikan Orangtua

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Dengan tingkat pendidikan orangtua yang dimilikinya akan dapat

mengarahkan anak-anaknya didalam proses pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya kecenderungan orangtua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan menganggap penting pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga mereka akan memiliki minat yang lebih tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Nopembri, 2007)

2. Tingkat Pendapatan Orangtua

Pendapatan adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi (Nopembri, 1982:92). Pendapatan orangtua digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan keluarga, karena pendapatan orangtua merupakan sumber untuk memperoleh semua kebutuhan yang diinginkan termasuk kebutuhan pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan yang diterima penduduk digolongkan berdasarkan 4 golongan yaitu: (1) golongan penduduk berpendapatan rendah, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata <Rp.1.500.000 per bulan, (2) golongan penduduk berpendapatan sedang, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata antara Rp.1.500.000-Rp.2.500.000 per bulan, (3) golongan penduduk berpendapatan tinggi, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000-Rp.3.500.000 per bulan, (4) golongan penduduk berpendapatan sangat tinggi, yaitu penduduk yang berpendapatan >Rp.3.500.000

3. Jumlah Tanggungan Orangtua

Semakin banyak jumlah tanggungan orangtua maka dana yang dibutuhkan akan semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini berdampak pada alokasi dana yang diberikan untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka, semakin banyak tanggungan dalam keluarga maka dana yang dialokasikan tidak dapat bermanfaat bagi masa depan anak.

Jumlah tanggungan keluarga dapat digolongkan menjadi empat (Sumardi dalam Gigih, 1985:133), yaitu:

- a. Tanggungan sebanyak 10 orang atau lebih dapat dikatakan sangat banyak
- b. Tanggungan sebanyak 7-9 orang dapat dikatakan banyak
- c. Tanggungan sebanyak 5-6 orang dapat dikatakan sedang
- d. Tanggungan sebanyak 1-4 orang dapat dikatakan sedikit

4. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan sosial adalah kehidupan manusia dan interaksinya dengan sesamanya (Nopembri, 2007) manusia tidak dapat hidup sendiri, sesuai kodratnya manusia memerlukan hidup bersama dan hidup bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan secara umum tempat tinggal orangtua memacu dalam mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak mereka. Orangtua yang tinggal dalam masyarakat berpendidikan, akan mendorong untuk menyekolahkan anaknya, sebaliknya orangtua yang tinggal dalam masyarakat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah akan mempengaruhi pula untuk tidak menyekolahkan anaknya.

5. Faktor jarak dari Rumah ke Sekolah

Jarak menjadi objek utama dalam pembicaraan mengenai karakteristik suatu kawasan di atas permukaan bumi. Penggunaan jarak menjadikan para ahli geografi lebih memahami beberapa bagian menarik dari distribusi suatu kawasan, karakteristik vegetasi, tanah iklim, serta karakteristik masyarakat yang hidup di dalamnya apakah mampu beradaptasi atau bahkan mendominasi lingkungan mereka. Signifikansi biaya dan jarak ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada bagian ini, diantaranya adalah dalam mempelajari jalan, kualifikasi jarak geografi dapat dinyatakan juga dalam “biaya” dari jarak tersebut. Biaya dari jarak adalah refleksi dari topografi contoh penduduk dengan kemampuan ekonomi yang baik cenderung mencari lokasi tempat tinggal yang jauh dari pusat kota dan terletak pada zone biaya terjauh, aspek dari biaya jarak adalah waktu jarak. Perkembangan wilayah dipengaruhi oleh lokasi relatif. Lokasi relatif suatu wilayah atau tempat yaitu kedudukan wilayah atau tempat yang bersangkutan dalam hubungan dengan faktor alam dan budaya yang ada disekitarnya. Lokasi menggambarkan keterjangkauan perkembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dengan wilayah lain (Nopembri, 2007)

Keterjangkauan yang rendah akan menyebabkan susahny suatu daerah mencapai kemajuan, sebaliknya semakin daerah itu mudah dijangkau maka semakin mudah daerah itu mengalami kemajuan. Hal ini berkaitan dengan jarak. Berkaitan dengan jarak semakin dekat jarak antar daerah berarti semakin mudah kontak terjadi (Bintarto 1979:16). dari sini dapat disimpulkan bahwa jarak yang jauh dari rumah akan sulit dicapai dan membutuhkan banyak biaya, dari pengertian tersebut jelas bahwa dengan jarak yang jauh antara rumah dan sekolah sangat mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekoah.

6. Fasilitas Jalan

Jalan merupakan prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang di peruntukan bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan. Pengertian jalan tidak terbatas pada jalan pada permukaan tanah, akan tetapi termasuk jalan yang melintasi sungai besar/danau/laut, di bawah permukaan air dan di atas permukaan tanah.

Menurut perannya, jalan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu jalan arteri (yang melayani angkutan arteri), dengan ciri-ciri perjalanan jauh, kecepatan tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien, jalan kolektor yang melayani angkutan pengumpulan dengan ciri-ciri: perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi, dan jalan lokal dengan ciri-ciri: kecepatan kendaraan $>20\text{km/jam}$, lebar jalan $>6\text{meter}$.

Fungsi jalan dibedakan menjadi : (1) Fungsi jalan primer kelas I atau lebih sering disebut dengan jalan propinsi karena berfungsi menghubungkan jalan antara kota-kota penting, atau menghubungkan pusat industri ke pelabuhan atau bandara, jalan digunakan untuk kendaraan yang berkecepatan tinggi yang bertonase besar. (2) Fungsi jalan sekunder kelas II merupakan jalan antara kota yang lebih kecil seperti Kecamatan, biasanya dilalui kendaraan yang berkecepatan sedang sampai tinggi, dengan bobot sedang. (3) Fungsi jalan penghubung kelas III atau kolektor merupakan jalan sejenis atau berlainan jenis (Ditjen Bina Marga 1976 dalam Nopembri 2007)

7. Fasilitas Transportasi

Hampir seluruh kehidupan manusia tidak terlepas dari keperluan akan pengangkutan. Pengangkutan diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkutan tumbuh dan berkembang sejalan dengan majunya tingkat kehidupan dan budaya manusia. Kehidupan masyarakat yang maju ditandai oleh mobilitas yang tinggi, yang dimungkinkan oleh tersedianya fasilitas pengangkutan yang cukup.

Transportasi berperan sebagai bagian yang penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan yang tinggi guna mendukung mobilitas manusia, barang, jasa. Mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fasilitas transportasi merupakan sektor yang sangat penting karena transportasi sebagai sarana seseorang untuk melakukan perjalanan keterkaitan dengan pendidikan anak bahwa tercukupinya sarana dan prasarana transportasi mempengaruhi anak untuk melanjutkan pendidikannya. Semakin banyak sarana dan prasarana, maka mempermudah anak untuk pergi ke sekolah, dengan demikian jelas bahwa sarana transportasi juga sangat berpengaruh dalam mempengaruhi minat untuk melanjutkan sekolah.

Tabel. 2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Pengarang	Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Pendekatan	Pengumpulan Data	Hasil
1.	Nur Berlian VA	Faktor-faktor Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 1, Januari 2011)	Memperoleh informasi tentang daerah daerah yang paling rendah dalam pencapaian wajar dikdas, Mengkaji faktor-faktor yang terkait rendahnya pencapaian wajar dikdas, merumuskan alternatif upaya pemecahan masalah penuntasa wajar dikdas	Memperoleh bahan kebijakan tentang langkah-langkah dan strategi untuk memperkecil kesenjangan pencapaian wajar dikdas 9 tahun.	Kuantitatif	Kualitatif (pengamatan lapangan di beberapa daerah kasus)	Provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur pada umumnya memiliki masalah Wajar Dikdas dari segi tingginya persentase anak usia pendidikan dasar yang tidak sekolah, yaitu dimulai dari tingkat SD/MI, sedangkan di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) permasalahannya lebih banyak di tingkat SMP/Mts. Faktor-faktor penyebab di setiap daerah cukup bervariasi antara lain faktor kemiskinan penduduk, kesulitan menuju sekolah, kurangnya layanan pendidikan, rendahnya motivasi orangtua dan siswa terhadap pendidikan, kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta faktor sosial budaya.
2.	Ferry Firmansyah	Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun di	Apa latar belakang pemerintah	Untuk menjelaskan latar belakang	Deskriptif historis (heuristik,	Kualitatif	Kualitas pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan melalui program wajib belajar 9 tahun dalam rangka

		Indonesia Periode 1994-2008 (e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 1, No 2, Mei 2013)	mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, bagaimana hasil pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sampai dengan ketuntasan berdasarkan pencapaian partisipasi anak sekolah. Metode penelitian melalui pendekatan deskriptif historis yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.	pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, untuk menganalisis hasil pelaksanaan wajib belajar 9 tahun berdasarkan partisipasi sekolah.	kritik sumber, interpretasi, historiografi)		menuju persaingan industrialisasi. Indikator pencapaian dapat dilihat melalui APK SD/MI mencapai 115,51% dan APK SMP/MTs mencapai 98,11% di tahun 2008 sehingga dinyatakan tuntas karena sesuai dengan kriteria Tuntas Paripurna.
3.	Sitta Aulia	Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang	Bagaimana dukungan pemerintah kota Surabaya	Memperoleh informasi tentang dukungan	Deskriptif kualitatif	Studi dokumentasi, observasi,	Dukungan pemerintah pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dengan pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) mulai pendidikan dasar

		Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan) (Jurnal Politik Muda, Vol 2 No 1, Januari-Maret 2012, hal 204-216)	dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, bagaimana dampak dukungan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah kota Surabaya terhadap pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah.	pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dan mengkaji dampak dukungan pemerintah kota Surabaya berupa program kebijakan yang dijalankan di tingkat sekolah.		dan wawancara	hingga pendidikan menengah negeri dan Hibah BOPDA pada sekolah swasta, pelaksanaan program BOPDA berdampak positif pada peningkatan akses pendidikan untuk masyarakat kota Surabaya dan berdampak adanya quota bagi masyarakat luar kota Surabaya, dampak BOPDA pada pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah menengah dan kejuruan berpengaruh pada manajemen pelaksanaan ditingkat sekolah, antara lain; kebijakan sekolah dalam hal pembiayaan, kondisi sarana dan prasarana pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta partisipasi orangtua.
4.	Yenny Merinatul Hasanah	Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Yogyakarta (Jurnal Akuntabilitas Manajemen	Untuk mengetahui pelaksanaan program, pencapaian tujuan program, hambatan-hambatan pelaksanaan	Pelaksanaan program, pencapaian tujuan program, hambatan-hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12	Kualitatif	Discrepancy evaluation program	Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun; kecukupan tenaga pendidik belum terpenuhi pada jenjang SD, ketersediaan sarana prasarana belum terpenuhi keseluruhan, ketersediaan pembiayaan pendidikan sudah terpenuhi. Pencapaian tujuan program wajib belajar; meningkatkan APS,

		Pendidikan, Vol 5, No 2, September 2017 halaman 228-239)	program wajib belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta.	tahun di Kota Yogyakarta.			mengurangi APS, meningkatkan AM, Hambatan-hambatan; rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, rendahnya minat anak dan kesadaran orangtua thd pentingnya pendidikan untuk masa depan, sosialisasi program wajib belajar kurang maksimal.
5.	Tety Nur Cholifah	Pengaruh Latar Belakang Tingkat Pendidikan Orangtua dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Kelas IV SDN Kecamatan Sananwetan Kota Blitas (Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 1	Mengetahui pengaruh latar belakang tingkat pendidikan orangtua terhadap hasil belajar siswa, pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa, pengaruh latar belakang tingkat pendidikan orangtua dan gaya belajar	Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan orangtua terhadap hasil belajar siswa SDN kelas IV, adakah pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa SDN kelas IV, dan adakah pengaruh pendidikan	Dokumentasi dan kuesioner	Teknik deskriptif kualitatif	Ada pengaruh positif dan signifikan antara latar belakang tingkat pendidikan orangtua terhadap hasil belajar siswa, ada pengaruh positif dan signifikan antara gaya belajar terhadap hasil belajar siswa, ada pengaruh dan signifikan antara latar belakang tingkat pendidikan orangtua dan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa.

		Nomor 3 Bulan Maret Tahun 2016, Halaman 486- 491)	terhadap hasil belajar siswa	orangtua dan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa SDN Kelas IV Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.			
--	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

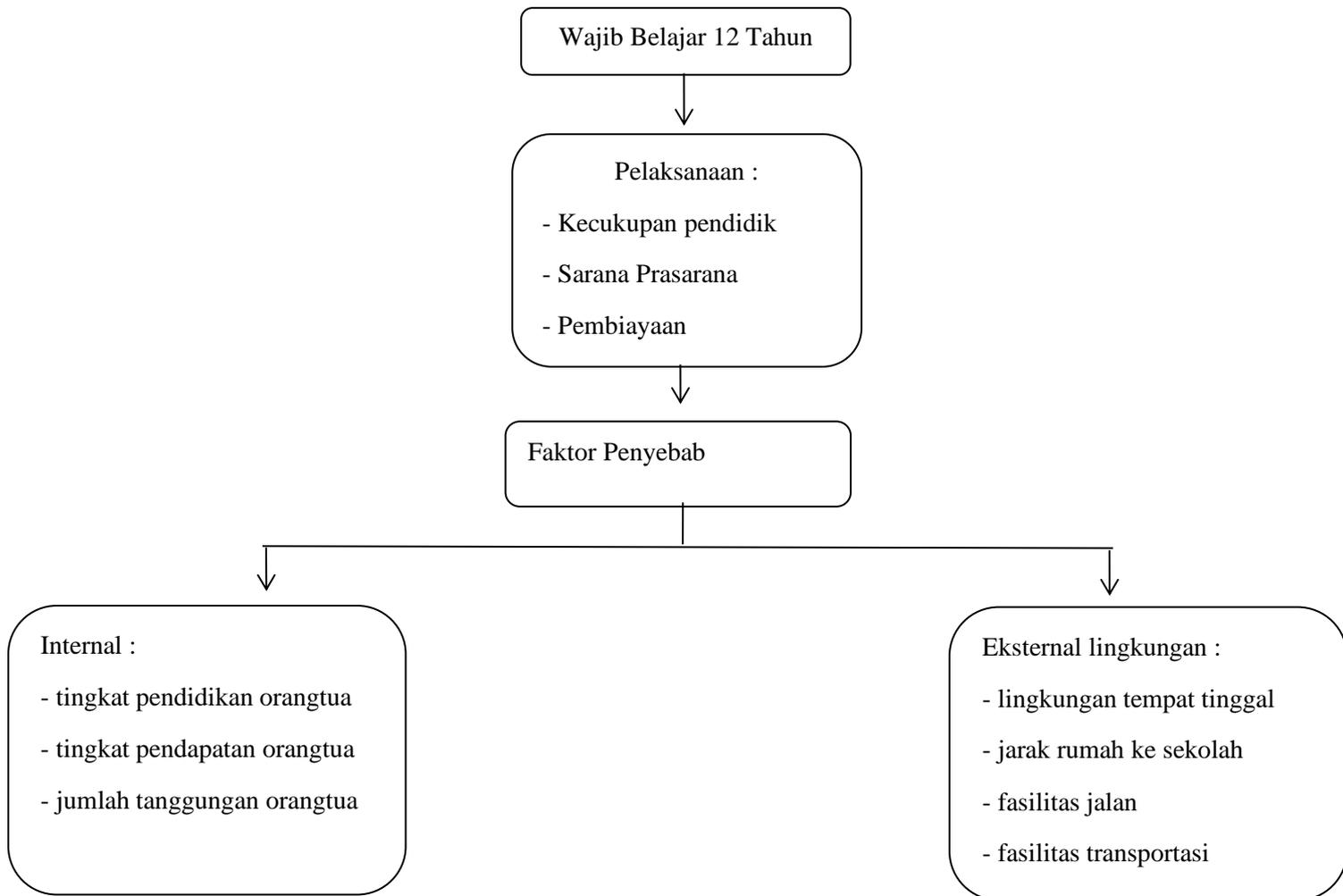
2.2. Kerangka Berfikir

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan manusia, karena pendidikan memegang peranan dalam pembangunan bangsa dan negara, pendidikan yang diberikan saat ini akan berdampak pada kecerdasan dan kemampuan bahkan watak bangsa di masa yang akan datang. Pendidikan berperan sebagai dasar dalam pembentukan kualitas diri manusia yang memiliki daya saing dan kemampuan menyerap teknologi yang akan mampu meningkatkan produktivitas. Kondisi pendidikan suatu bangsa mencerminkan kualitas sumber daya yang mendukung percepatan pembangunan pada bangsa itu sendiri. .

Pemerintah Kabupaten Tegal menargetkan APK SMA sebesar 76%. APK di suatu wilayah apabila <76% maka dapat dikategorikan tidak sesuai dengan target pemerintah, namun apabila >76% dapat dikategorikan sesuai dengan target pemerintah. Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal, Kecamatan Suradadi pada tahun 2018 menunjukkan tingkat APK SMA sebesar 29%, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat APK di Kecamatan Suradadi tidak sesuai dengan target pemerintah. Selain itu, pada data APK dan APM menunjukkan masih terdapat anak usia sekolah yang belum memperoleh pendidikan program wajib belajar 12 tahun. Namun, ada kalanya terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Anak yang tidak sekolah pada suatu wilayah dapat dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi antara lain; faktor sosial dan fisik lingkungan..

Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal menghadapi suatu masalah. Oleh karenanya, perlu diadakan upaya untuk mempermudah proses jalannya penelitian maka disusun alur penelitian yang

digunakan untuk pedoman penelitian. Secara skematis alur penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Kerangka berfikir penelitian dengan judul Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut:

5.1.1 Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selama 3 periode (tahun 2016-2018) mengalami kenaikan. Tingkat APK mengalami kenaikan sebesar 1,58% dan tingkat APM sebesar 1,33%

5.1.2 Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, antara lain: tingkat pendapatan orangtua tergolong rendah yaitu kurang dari Rp. 1.500.000, tingkat pendidikan terakhir orangtua rata-rata di tingkat SD sebesar 57,8%, jenis pekerjaan orangtua rata-rata sebagai nelayan, keluarga mendukung anak untuk sekolah, waktu yang dibutuhkan anak untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah 20 menit dengan jarak tempuh 3km-5km, dan jumlah rata-rata keluarga inti adalah 5 orang.

5.2 SARAN

Saran-saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan dari penelitian, sebagai berikut:

5.2.1 Dinas Pendidikan harus memastikan secara teliti mengenai informasi program wajib belajar 12 tahun agar sampai kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui informasi terbaru, negara bertanggungjawab atas anak-anak yang

kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis dan tidak ada alasan bagi peserta didik yang tidak mampu tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

5.2.2 Sekolah lebih meningkatkan kegiatan mensosialisasikan kepada orangtua siswa tentang adanya dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu orangtua yang tidak mampu membiayai anaknya melanjutkan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aulia, Sitta. 2012. *Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan)*. Jurnal Politik Muda, Vol 2, No 1. Universitas Airlangga.
- Berlian, Nur. 2011. *Faktor-Faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol 17, Nomor 1, Januari.
- BPS. 2018. *Kecamatan Suradadi dalam Angka 2018*. Tegal: BPS
- Diknas. 2003. *Departemen Pendidikan Nasional Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Diknas.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Tegal: Dinas P dan K.
- Firmansyah, Ferry. 2013. *Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol 1, No 2, Mei.
- Fry, H, Keteridge, S.,& Marshall, S. (2009). *A handbook for teaching and learning in higher education enhancing academic practice*. New York: Roudledge,

- Hasanah, Yenny Merinatul. 2017. *Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Vol 5, No 2. UNY: Yogyakarta.
- Khirunnisa. 2018. Thesis. *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka*. Malang: Universitas Muhammadiyah Pematang.
- Rothbard, M. A. N. (1999). *Education free and compulsory*. Auburn: Ludwig von Mises Institute.
- Saroni, Mohamad. 2013. *Pendidikan untuk Orang Miskin: Membuka Peran Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta; Ar-Ruz Media.
- Sriyanto, dan Dewi. 2019. Implementasi Pembelajaran Media Flip Chart dan Powerpoint Materi Dinamika Planet Bumi Sebagai Ruang Kehidupan Kelas X IPS 1 Dan X IPS 2 Ma Al-Asror Semarang.
- Talman, Priyadi, dan Chaeruddin. 2016. *Wajib Belajar 12 Tahun: Tantang Regulasi dan Implementasi*. Jakarta; New Indonesia.
- Vassiliou. A. (2011). *Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulation and statistics*. Brussels: EACEA P9 Eurydice.
- Yenny Merinatul. 2017. *Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Yogyakarta*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol 5, No 2, September 2017 (228-239)
- Yusta, Thesar. 2015. *Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 3, No 2. Surabaya: Universitas Airlangga.